Journal of Authentic Research
https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/index

November 2026 Vol. 5, No. 4
e-ISSN: 2828-3724
pp. 8121-8135

Persepsi Masyarakat dalam Aksi Demonstrasi APDeSI tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 di Media Sosial TikTok

[1*] Tesa Ramayanti, [2] Iip Permana

[1]Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat., Indonesia

*Corresponding Author e-mail: tesaramayanti@gmail.com

Received: September 2026; Revised: October 2026; Published: November 2026

Abstrak

Perubahan ketentuan penyaluran Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 memunculkan perdebatan di TikTok dalam wacana demonstrasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Meskipun kajian tentang persepsi publik di media sosial telah berkembang, analisis kecenderungan sikap yang dipadukan dengan pemodelan topik pada konteks kebijakan Dana Desa masih terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis kecenderungan sikap pengguna TikTok dan topik dominan secara terpadu. Penelitian menggunakan pendekatan mixed-methods komputasional dengan 6.599 komentar yang dikumpulkan melalui scraping pada 8 Desember 2025–31 Januari 2026. Komentar netral, ambigu, tidak relevan, duplikat, dan spam dikeluarkan sebelum analisis. Data dianalisis menggunakan IndoBERT untuk klasifikasi stance dan BERTopic untuk pemodelan topik. Hasil menunjukkan 5.797 komentar (87,8%) cenderung menerima dan 802 komentar (12,2%) cenderung menolak. BERTopic menghasilkan enam topik pada kelompok menerima dan dua topik pada kelompok menolak. Kelompok menerima didominasi pembahasan audit, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas Dana Desa; kelompok menolak memuat kekhawatiran atas ketersediaan Dana Desa, dampak kebijakan, dan kritik terhadap pihak pengelola. Temuan ini menggambarkan pola sikap dalam korpus komentar yang dianalisis dan tidak mewakili seluruh masyarakat atau seluruh pengguna TikTok. Klasifikasi sikap perlu ditafsirkan secara kontekstual karena kritik terhadap pelaksana kebijakan tidak selalu berarti penolakan terhadap kebijakan itu sendiri.

Kata kunci: PMK Nomor 81 Tahun 2025, TikTok, *stance detection*, BERTopic, Dana Desa.

How to Cite: Ramayanti, T., & Permana, I. (2026). Persepsi Masyarakat dalam Aksi Demonstrasi APDESI tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 di Media Sosial TikTok. *Journal of Authentic Research*, *3*(2), 156–173. https://doi.org/10.36312/jar.v5i4.7083

https://doi.org/10.36312/jar.v5i4.7083

Copyright© 2026, Ramayanti & Permana.
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan prinsip dan standar pemerintah dalam mengelola urusan publik yang mengikat masyarakat (Hermanto Suaib, 2022). Salah satu bentuknya adalah kebijakan fiskal yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mengendalikan inflasi (Siswajanthy et al., 2024). Dalam pengelolaan Dana Desa, kebijakan tersebut diwujudkan melalui PMK Nomor 81 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024, yang menetapkan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II, termasuk dokumen pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau bukti komitmen dukungan melalui

APBDes (Kompas, 2025). Ketentuan ini menuai penolakan sejumlah kepala desa dan menjadi salah satu latar belakang demonstrasi Dewan Pimpinan Pusat APDESI di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat (Kompas, 2025).

Aksi demonstrasi DPP APDESI merupakan bentuk penyampaian aspirasi terhadap perubahan regulasi melalui PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang menambahkan persyaratan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam penyaluran Dana Desa. Perubahan tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program desa yang telah direncanakan, terutama karena berkaitan dengan pencairan Dana Desa tahap II (ANTARA News, 2025; Prima, 2025).

Dalam penelitian ini, persepsi pengguna TikTok didefinisikan sebagai pemaknaan pengguna media sosial terhadap informasi kebijakan yang diekspresikan melalui komentar. Stance didefinisikan sebagai kecenderungan sikap menerima (*favor*) atau menolak (*against*) terhadap objek kebijakan. PMK Nomor 81 Tahun 2025 didefinisikan sebagai regulasi perubahan ketentuan penyaluran Dana Desa, sedangkan Dana Desa didefinisikan sebagai alokasi anggaran negara untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Robbins & Judge, 2020; Kompas, 2025). Salah satu ketentuan penting dalam PMK Nomor 81 Tahun 2025 adalah Pasal 29B yang mengatur penundaan hingga penghentian penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2025 bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai batas waktu. Ketentuan ini berdampak pada Dana Desa *earmark* dan *non-earmark*. Dana *earmark* mencakup alokasi untuk BLT Desa, penanganan stunting, dan ketahanan pangan, sedangkan dana *non-earmark* digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dengan cakupan penggunaan lebih fleksibel.

Dana Desa *earmark* masih dapat disalurkan kembali apabila persyaratan dipenuhi sesuai ketentuan dan tenggat waktu. Sebaliknya, Dana Desa *non-earmark* yang tidak tersalurkan hingga batas waktu tidak dapat dicairkan kembali meskipun persyaratan administratif kemudian dilengkapi. Dampak ketentuan tersebut dilaporkan terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Kepahiang dengan nilai Dana Desa *non-earmark* yang tertahan sekitar Rp5,9 miliar (Fitriani, 2026). Kondisi ini menghambat pelaksanaan program pembangunan fisik maupun nonfisik serta menimbulkan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas kegiatan yang telah dilaksanakan (Fitriani, 2026). Dampak serupa berpotensi memengaruhi program di Desa Kalisidi, Kabupaten Semarang, seperti pemanfaatan 175 ton kotoran hewan untuk pemulihan lahan pertanian dan program Pemberian Makanan Tambahan bagi balita (Asih, 2025).

Situasi tersebut menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam tanggapan di ruang digital. Informasi mengenai potensi terhambatnya program desa beredar melalui media sosial dan mendorong masyarakat menyampaikan pandangan melalui komentar. Dalam konteks ini, TikTok menjadi salah satu ruang digital tempat informasi kebijakan publik tersebar dan diperdebatkan. Fitur *For You Page* menggunakan algoritma rekomendasi yang mempelajari interaksi pengguna, seperti *likes*, komentar, *shares*, durasi menonton, dan jenis konten yang diakses, sehingga sistem mempersonalisasi konten sesuai minat pengguna (Baumann et al., 2025).

Pemilihan TikTok dilakukan secara argumentatif karena tiga alasan. Pertama, penelusuran awal pada TikTok, Instagram, dan X dengan kata kunci yang sama menunjukkan TikTok memiliki jumlah unggahan relevan dan interaksi pengguna lebih tinggi dibandingkan dua platform lain. Kedua, kolom komentar TikTok

menyediakan data ekspresi sikap publik yang relatif terbuka dan terikat pada konten kebijakan tertentu. Ketiga, karakteristik video pendek, musik, efek visual, dan fitur kreatif TikTok memudahkan penyampaian pesan kebijakan secara dinamis (Akhyar, 2026). Perbincangan mengenai demonstrasi APDESI terkait PMK Nomor 81 Tahun 2025 terlihat pada sejumlah unggahan TikTok dengan tingkat interaksi tinggi. Unggahan akun @pojoksatu.id memperoleh sekitar 2,8 juta tayangan, 163 ribu *likes*, 4 ribu komentar, dan 4 ribu *shares*; unggahan akun @milenialzkcee mencapai sekitar 7,8 juta tayangan, 320 ribu *likes*, 4 ribu komentar, dan 16 ribu *shares*.

Tingginya interaksi menunjukkan bahwa isu demonstrasi APDESI terkait PMK Nomor 81 Tahun 2025 memperoleh perhatian dan memunculkan respons pengguna TikTok. Kolom komentar menjadi ruang untuk menyampaikan pandangan mengenai kebijakan, termasuk sikap menerima maupun menolak. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan konsep ruang publik politik Habermas 1984 dalam Setiawan (2023), yaitu ruang tempat warga menyampaikan aspirasi dan bertukar pendapat secara terbuka serta argumentatif dalam kehidupan demokratis. Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini diarahkan pada tiga landasan: teori persepsi untuk menjelaskan pemaknaan stimulus kebijakan (Robbins & Judge, 2020), konsep ruang publik untuk menjelaskan kolom komentar sebagai arena diskusi (Setiawan, 2023), dan analisis stance untuk mengidentifikasi kecenderungan sikap pengguna (Wilie et al., 2020; Grootendorst, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran media sosial sebagai ruang pertukaran informasi dan pembentukan persepsi publik (Masythoh & Wicaksono, 2025). Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis stance pengguna TikTok terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 dalam wacana demonstrasi APDESI dan memadukannya dengan pemodelan topik masih terbatas. Celah penelitian terletak pada belum adanya analisis terpadu yang mengidentifikasi kecenderungan sikap sekaligus topik dominan pada komentar TikTok terkait kebijakan Dana Desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan IndoBERT untuk klasifikasi stance dan BERTopic untuk pemodelan topik dalam konteks kebijakan fiskal-desa di Indonesia. Penelitian ini penting karena perubahan ketentuan penyaluran Dana Desa berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Beragam tanggapan pengguna TikTok memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan dinilai dalam ruang publik digital, termasuk pandangan mengenai dampaknya terhadap pengelolaan Dana Desa dan keberlangsungan program desa. Namun, komentar yang mendukung atau menolak suatu hal perlu ditafsirkan sesuai konteksnya, sebab kritik terhadap aparat desa maupun pelaksanaan kebijakan tidak selalu menunjukkan sikap menerima atau menolak PMK itu sendiri (Rogers, 2003). Penelitian ini bertujuan menganalisis kecenderungan sikap pengguna TikTok terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 dan mengidentifikasi topik dominan dalam komentar terkait wacana demonstrasi APDESI.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods komputasional. Analisis kuantitatif berupa klasifikasi stance dan distribusi kategori dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan analisis tematik berbantuan BERTopic dan

interpretasi konteks komentar. Pemilihan desain ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran kecenderungan sikap secara terukur sekaligus menjelaskan isu-isu yang menyertai setiap kategori sikap. BERTopic tidak diposisikan sebagai analisis kualitatif, melainkan sebagai metode komputasional yang hasilnya diinterpretasikan secara kualitatif.

Data penelitian berupa komentar pengguna pada konten TikTok yang membahas PMK Nomor 81 Tahun 2025 dan demonstrasi kepala desa, yang dikumpulkan menggunakan Google Colab, Python, dan Apify melalui teknik *web scraping*. Sebanyak 6.599 komentar dianalisis untuk mengidentifikasi kecenderungan sikap masyarakat yang dikategorikan menjadi menerima (*favor*) dan menolak (*against*). Klasifikasi komentar dilakukan menggunakan model IndoBERT (Wiley et al., 2020), sedangkan pemetaan tema pembahasan pada masing-masing kategori sikap dilakukan dengan BERTopic (Grootendorst, 2022). Keandalan pelabelan data diperiksa menggunakan koefisien Cohen's Kappa (Cohen, 1960) melalui penilaian dua penilai terhadap 120 sampel komentar. Perbedaan penilaian antarpelabel diselesaikan melalui diskusi dan peninjauan oleh peninjau ketiga. Kinerja model klasifikasi dievaluasi menggunakan *confusion matrix* dengan memperhatikan nilai akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score* (Devlin et al., 2019).

Subjek penelitian adalah pengguna media sosial TikTok yang menyampaikan pendapat melalui kolom komentar pada konten mengenai PMK Nomor 81 Tahun 2025 dalam konteks wacana demonstrasi kepala desa oleh APDESI. Data berupa komentar yang dikumpulkan dari sejumlah konten relevan pada periode 8 Desember 2025–31 Januari 2026. Komentar dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan topik penelitian dan dianalisis untuk mengidentifikasi kecenderungan sikap pengguna serta memetakan tema utama. Fokus penelitian terletak pada ekspresi sikap dan wacana dalam komentar TikTok, bukan pada pelaksanaan demonstrasi secara langsung.

Instrumen penelitian mencakup perangkat pengumpulan data, pedoman pelabelan, serta model dan teknik analisis teks. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Google Colab, Python, dan Apify melalui *web scraping*. Data melalui *preprocessing* untuk membersihkan dan menyiapkan teks. Pedoman pelabelan mengelompokkan komentar ke dalam dua kategori sikap, yaitu menerima (*favor*) dan menolak (*against*). Model IndoBERT digunakan untuk mengklasifikasikan kecenderungan sikap, sedangkan BERTopic digunakan untuk mengidentifikasi tema utama. Keandalan pelabelan diuji menggunakan Cohen's Kappa berdasarkan penilaian dua penilai terhadap 120 sampel. Kinerja model dievaluasi menggunakan *confusion matrix* dengan indikator akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*.

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui enam tahap. Pertama, pengumpulan data komentar TikTok melalui *web scraping* dengan Apify, Python, dan Google Colab berdasarkan kata kunci PMK Nomor 81 Tahun 2025 dan wacana demonstrasi APDESI pada 8 Desember 2025–31 Januari 2026. Kedua, prapemrosesan data meliputi penghapusan data tidak relevan atau duplikat, pembersihan karakter, dan normalisasi teks. Ketiga, pelabelan data ke dalam kategori menerima (*favor*) dan menolak (*against*); dua penilai melabeli 120 sampel dan perbedaan diselesaikan melalui diskusi serta peninjauan peninjau ketiga. Keempat, klasifikasi sikap menggunakan IndoBERT. Model di-*fine-tuning* menggunakan data berlabel dengan pembagian data latih dan data uji; evaluasi dilakukan pada 25 sampel uji berlabel.

Parameter *fine-tuning* yang digunakan. Kelima, pemodelan topik menggunakan BERTopic dengan parameter. Keenam, integrasi hasil klasifikasi dan pemodelan topik untuk menjelaskan distribusi sikap serta tema yang berkembang.

Indikator keberhasilan penelitian ditentukan berdasarkan kemampuan setiap tahapan analisis dalam menjawab tujuan. Pada pelabelan, keberhasilan dinilai melalui Cohen's Kappa untuk mengukur kesepakatan dua penilai. Pada klasifikasi, keberhasilan dievaluasi menggunakan akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*. Pada pemodelan topik, keberhasilan dinilai berdasarkan keteridentifikasian tema utama dan keterkaitannya dengan isi komentar, dengan mempertimbangkan nilai koherensi dan keberagaman topik. Penelitian dinilai berhasil apabila mampu menggambarkan distribusi kecenderungan sikap pengguna serta mengidentifikasi tema yang berkembang dalam diskusi mengenai PMK Nomor 81 Tahun 2025 di TikTok.

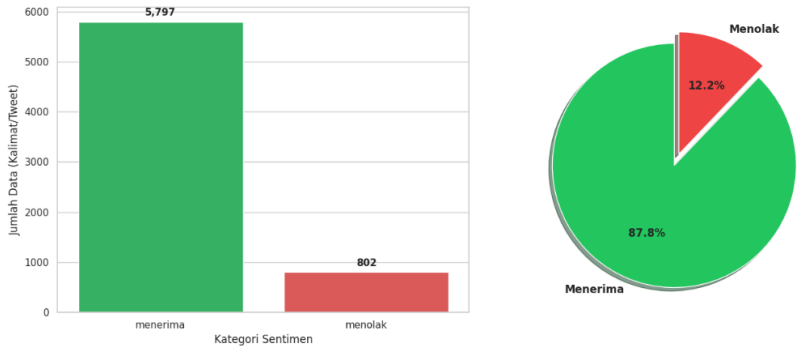
Analisis data dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif mengidentifikasi kecenderungan sikap melalui *stance detection*; komentar yang telah melalui prapemrosesan dan pelabelan diklasifikasikan dengan IndoBERT ke dalam menerima (*favor*) dan menolak (*against*). Hasil klasifikasi dianalisis berdasarkan jumlah dan persentase setiap kategori. Kinerja model dievaluasi menggunakan *confusion matrix*, akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*, sedangkan konsistensi pelabelan diperiksa melalui Cohen's Kappa. Analisis kualitatif menggunakan BERTopic untuk mengidentifikasi tema utama; hasilnya ditelaah melalui kata kunci dan komentar yang mewakili setiap topik. Bagian instrumen, prosedur, dan analisis data disusun secara ringkas agar tidak tumpang tindih; rincian teknis yang bersifat operasional diletakkan pada prosedur, sedangkan kriteria penilaian diletakkan pada indikator keberhasilan. Interpretasi dilakukan dengan memperhatikan isi komentar agar kategori sikap tidak dilepaskan dari konteks pembicaraan pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecendrungan Persepsi Masyarakat terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025

Jika dikaitkan dengan teori persepsi (Robbins & Judge, 2020), informasi mengenai PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang disampaikan melalui konten TikTok dapat menjadi stimulus yang kemudian dimaknai pengguna media sosial. Persepsi tidak dipahami sebagai kondisi psikologis individual, melainkan diamati melalui ekspresi pengguna pada kolom komentar. Perbedaan isi komentar menunjukkan bahwa stimulus yang sama dapat dimaknai berbeda, sehingga muncul dua posisi sikap, yaitu menerima (*favor*) dan menolak (*against*). Perspektif sistem politik David Easton dalam Bhakuni (2010) membantu menjelaskan komentar pengguna sebagai bentuk umpan balik terhadap kebijakan pemerintah. Kolom komentar TikTok dapat menjadi ruang untuk mengamati ekspresi dukungan, keberatan, kritik, dan harapan masyarakat terhadap kebijakan publik.

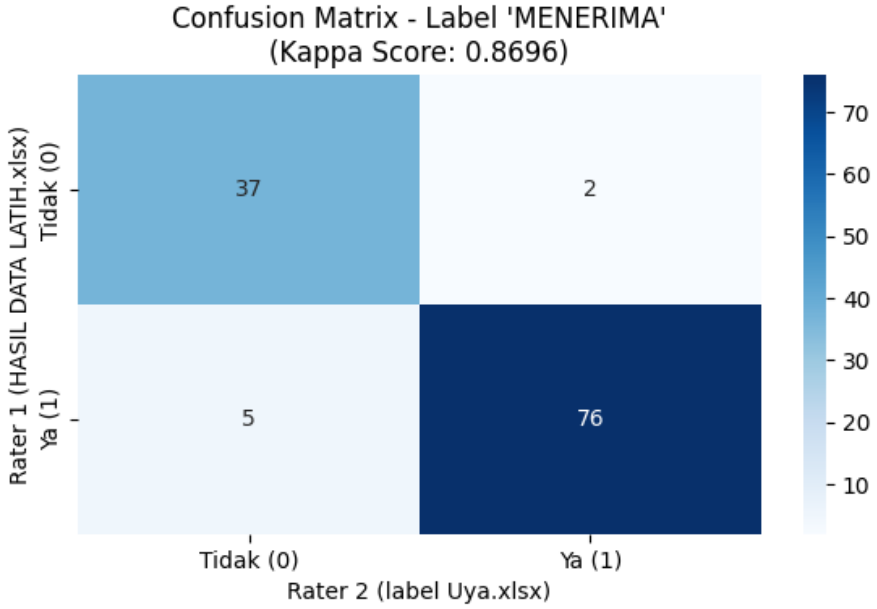
Berdasarkan hasil pemodelan dan klasifikasi menggunakan IndoBERT, distribusi kecenderungan sikap masyarakat terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Distribusi Stance Menggunakan IndoBERT

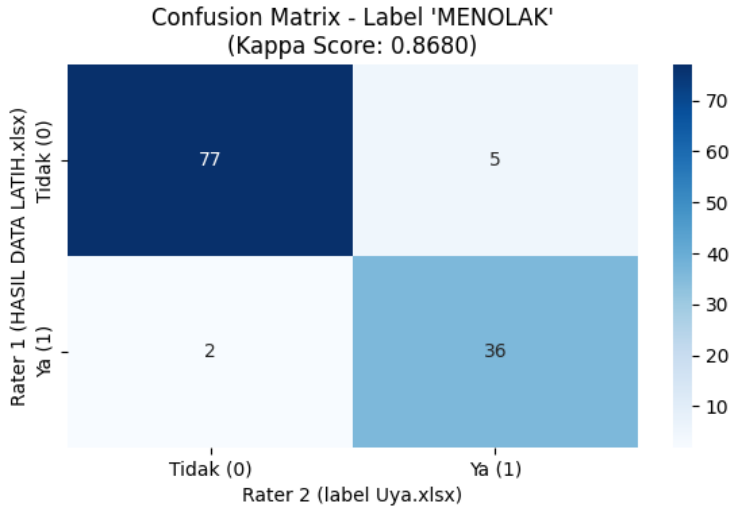
Berdasarkan Gambar 1, sebanyak 6.599 data teks dianalisis. Kategori menerima mendominasi dengan 5.797 komentar (87,8%), sedangkan kategori menolak berjumlah 802 komentar (12,2%). Perbedaan proporsi menunjukkan komentar menerima lebih banyak ditemukan, tetapi dominasi ini perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks komentar dan tidak langsung dianggap sebagai gambaran keseluruhan persepsi masyarakat.

Uji reliabilitas menggunakan Cohen's Kappa dilakukan untuk mengukur kesepakatan dua penilai dalam mengategorikan sikap. Hasil pengujian pada label menerima disajikan pada Gambar 2, sedangkan label menolak pada Gambar 3.



Gambar 1. Hasil Uji Reliabilitas Cohen's Kappa pada Stance "Menerima"

Berdasarkan Gambar 2, pengujian reliabilitas pada label menerima menghasilkan Cohen's Kappa sebesar 0,8696. Mengacu pada kriteria Landis dan Koch (1977), nilai tersebut termasuk kategori *Almost Perfect Agreement*. Dari 120 sampel, 76 data menunjukkan kesesuaian positif, 37 data kesesuaian negatif, dan 7 data menunjukkan ketidaksepakatan, yaitu 5 data ketika Rater 1 memberi label positif dan Rater 2 negatif, serta 2 data sebaliknya.



Gambar 2. Hasil Uji Reliabilitas Cohen's Kappa pada Stance "Menolak"

Pada label menolak, Cohen's Kappa sebesar 0,8680 sebagaimana ditunjukkan Gambar 3, juga termasuk *Almost Perfect Agreement* berdasarkan kriteria Landis dan Koch (1977). Hasil ini menunjukkan konsistensi tinggi kedua penilai dalam mengategorikan komentar.

Evaluasi Kinerja IndoBERT

Kinerja model IndoBERT dalam mengklasifikasikan komentar masyarakat terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 dievaluasi secara kuantitatif. Data yang telah melalui tahap prapemrosesan (*preprocessing*) dibagi menjadi data latih (*training data*) untuk mempelajari pola bahasa dan data uji (*testing data*) untuk mengukur kemampuan model dalam mengklasifikasikan data yang tidak digunakan selama pelatihan.

Evaluasi dilakukan menggunakan *confusion matrix* dengan empat metrik, yaitu *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. *Accuracy* mengukur ketepatan prediksi secara keseluruhan, *precision* menunjukkan ketepatan prediksi pada setiap kategori, *recall* mengukur kemampuan model mengenali data sesuai label sebenarnya, sedangkan *F1-score* menggambarkan keseimbangan antara *precision* dan *recall*. Keempat metrik tersebut digunakan untuk menilai kemampuan IndoBERT dalam membedakan komentar kategori *favor* (mendukung) dan *against* (menolak), sekaligus memperhatikan kemungkinan pengaruh ketidakseimbangan jumlah data antarkategori terhadap hasil klasifikasi.

Ringkasan hasil evaluasi kinerja model IndoBERT secara keseluruhan disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Ringkasan Metrik Evaluasi Performa Model IndoBERT

Metrik Evaluasi	Nilai (Desimal)	Nilai (Presentase)
Accuracy	0,9268	92.68%
Precision	0,9345	93.45%
Recal	0,9200	92.00%
F-Score	0,9213	92.13%

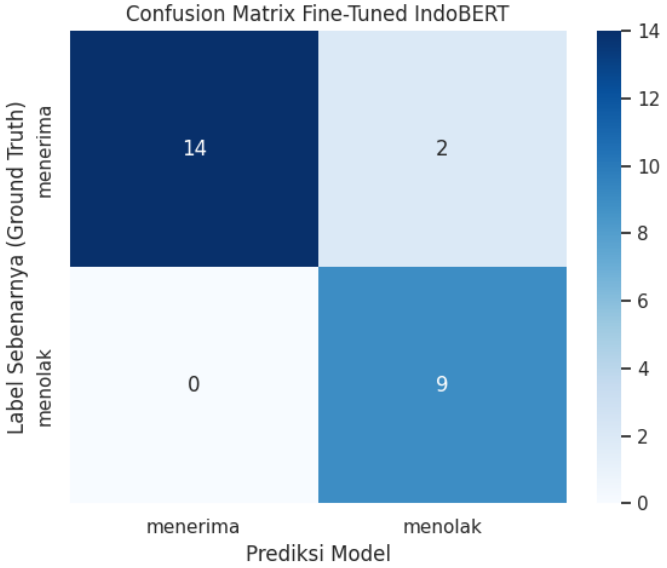
Berdasarkan Tabel 1, nilai *accuracy* sebesar 0,9200 (92,00%) merupakan nilai yang sama dengan hasil *confusion matrix* pada 25 sampel uji, yaitu 23 prediksi benar dari 25 data. Nilai *precision* 0,9345 (93,45%) merupakan *weighted average*, *recall* 0,9200 (92,00%), dan *F1-score* 0,9213 (92,13%). Nilai *accuracy* 0,9268 pada versi sebelumnya

tidak digunakan karena tidak konsisten dengan *confusion matrix*; nilai yang dilaporkan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Gambar 4 telah disamakan. Namun, penilaian pada setiap kategori tetap diperlukan untuk memastikan evaluasi tidak didominasi kategori dengan jumlah data lebih besar. Evaluasi per kategori disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Detail Kinerja Klasifikasi IndoBERT berdasarkan Kategori Stance

Kategori Stance	Precision	Recall	F1-Score	Support (Jumlah Data)
Menerima	1.0000	0,8750	0,9333	16
Menolak	0,8182	1,0000	0,9000	9
Accuracy	-	-	0,9200	25
Macro Average	0.9091	0.9375	0.9167	25
Weighted Average	0.9345	0.9200	0.9213	25

Berdasarkan Tabel 2, pada kelas menerima dengan *support* 16 data, model memperoleh *precision* 1,0000 (100%), *recall* 0,8750 (87,50%), dan *F1-score* 0,9333 (93,33%). Pada kelas menolak dengan *support* 9 data, model mencapai *recall* 1,0000 (100%), *precision* 0,8182 (81,82%), dan *F1-score* 0,9000 (90,00%). Secara keseluruhan, model mencatatkan *accuracy* 92,00% dengan *macro average* untuk *precision*, *recall*, dan *F1-score* masing-masing 0,9091; 0,9375; dan 0,9167. Nilai *weighted average* berturut-turut 0,9345; 0,9200; dan 0,9213. Hasil ini menunjukkan kinerja baik pada data uji, tetapi perlu ditafsirkan hati-hati karena jumlah sampel relatif terbatas. Visualisasi *confusion matrix* disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil Visualisasi *Confusion Matriks*

Berdasarkan Gambar 4, dari 16 komentar aktual menerima, 14 komentar diklasifikasikan benar dan 2 komentar diprediksi menolak. Seluruh 9 komentar aktual menolak berhasil diklasifikasikan benar tanpa kesalahan prediksi ke menerima. Model menghasilkan 23 prediksi benar dan 2 prediksi salah, sehingga akurasi 92,00%. Perbedaan proporsi data keseluruhan (87,8% menerima) dan data uji (16 dari 25 atau 64% menerima) dijelaskan oleh desain pengambilan sampel uji berlabel yang bersifat terbatas dan disusun untuk mengevaluasi kedua kategori, bukan sebagai estimasi

proporsi populasi. Angka 64% tidak dapat dibandingkan langsung dengan 87,8% sebagai perubahan distribusi, melainkan menunjukkan komposisi sampel evaluasi.

Analisi BERTopic

Bagian ini menyajikan hasil analisis tematik berbantuan BERTopic untuk mengidentifikasi isu utama dalam komentar TikTok terkait PMK Nomor 81 Tahun 2025. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan komentar berdasarkan kecenderungan sikap, yaitu menerima dan menolak, untuk melihat perbedaan tema pembahasan. Hasil analisis divisualisasikan menggunakan grafik batang untuk menampilkan kata kunci dengan bobot tertinggi pada setiap topik serta *word cloud* untuk menggambarkan kata yang paling sering muncul.

Berdasarkan Tabel 3, pemodelan topik pada kelompok menerima menghasilkan enam topik optimal dengan *Topic Coherence* (c_v) sebesar 0,3960 dan *Topic Diversity* sebesar 0,8600. Kelompok menolak menghasilkan dua topik optimal dengan *Topic Coherence* (c_v) sebesar 0,4872 dan *Topic Diversity* sebesar 0,9500. Nilai c_v tersebut tergolong rendah–sedang, sehingga interpretasi topik perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak diklaim sebagai koherensi yang kuat. Nilai pada tabel dan narasi telah diselaraskan dan tidak lagi menggunakan nilai ganda.

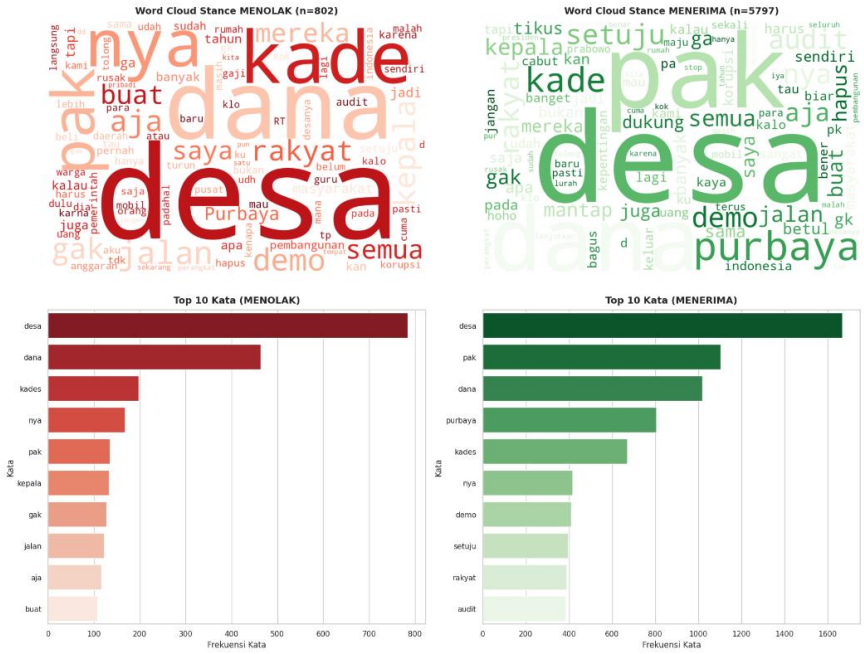
Evaluasi Pemodelan BERTopic

Berdasarkan Tabel 3, pemodelan topik pada kelompok menerima menghasilkan enam topik optimal dengan *Topic Coherence* (c_v) sebesar 0,3678 dan *Topic Diversity* sebesar 0,900. Kelompok menolak menghasilkan dua topik optimal dengan *Topic Coherence* (c_v) sebesar 0,4672 dan *Topic Diversity* sebesar 0,8500. Nilai tabel dan narasi diselaraskan menggunakan satu nilai final hasil eksperimen; jika terdapat perbedaan versi, nilai pada tabel harus mengikuti nilai yang dilaporkan pada narasi.

Tabel 3. Evaluasi Pemodelan BERTopic

Stance	Jumlah Topik (k)	Topic Coherence(c_v)	Topic Diversity	Evaluasi Kualitas Topik
Menerima	6	0,3678	0,90	Kualitas semantik cukup baik dan keterbedaan kata antar-topik sangat tinggi.
Menolak	2	0,4672	0,85	Kualitas semantik solid dan topik memiliki tingkat keunikan kata sangat tinggi

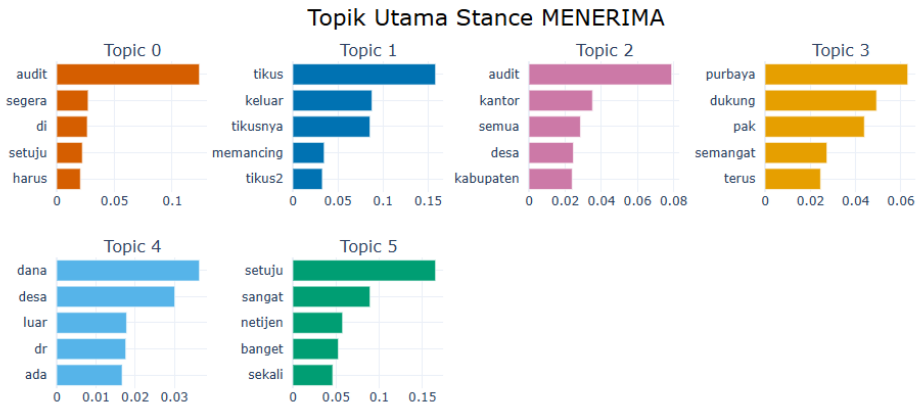
Nilai *Topic Diversity* sebesar 0,9000 pada kelompok stance menerima dan 0,8500 pada kelompok stance menolak menunjukkan bahwa kata kunci yang dihasilkan relatif beragam dengan tingkat pengulangan antartopik yang terbatas. Namun, nilai koherensi yang rendah–sedang menunjukkan bahwa topik yang terbentuk belum sepenuhnya padu secara semantik, sehingga tema perlu dibaca bersama konteks komentar.



Gambar 5. Word Cloud Stance Menerima dan Menolak

Berdasarkan Gambar 5 dan analisis frekuensi kata, istilah "desa", "dana", dan "kades" mendominasi percakapan pada kedua kelompok. Pada kelompok menolak (n = 802), kata "desa" muncul lebih dari 700 kali, "dana" lebih dari 400 kali, dan "kades" lebih dari 100 kali. Kata "jalan", "gak", dan "buat" juga ditemukan. Kemunculan kata tersebut mengindikasikan pembahasan mengenai kondisi desa, penggunaan dana, dan persoalan pembangunan. Keberadaan kata negasi seperti "gak" tidak serta-merta menunjukkan penolakan terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 karena dapat merujuk pada kritik terhadap kebijakan, perilaku perangkat desa, atau persoalan lain. Oleh sebab itu, interpretasi kategori menolak perlu mempertimbangkan konteks kalimat secara menyeluruh.

Pada kelompok menerima (n = 5.797), kata "desa" muncul lebih dari 1.600 kali, diikuti "pak" dan "dana" yang masing-masing muncul lebih dari 1.000 kali. Kata "purbaya" ditemukan lebih dari 800 kali, sedangkan "kades" muncul lebih dari 600 kali. Kata "setuju", "audit", "rakyat", dan "demo" turut mendominasi. Kata "purbaya" merujuk pada Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI yang muncul dalam pemberitaan dan komentar terkait kebijakan ini (Kompas, 2025). Kemunculan kata tersebut menunjukkan perhatian pada figur pengambil kebijakan, bukan necessarily penerimaan terhadap seluruh ketentuan PMK. Pola tersebut menunjukkan diskusi mencakup persoalan dana desa, kepala desa, serta pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran. Kata "setuju" dapat mengindikasikan dukungan terhadap suatu gagasan, sedangkan "audit" berkaitan dengan pengawasan penggunaan anggaran. Namun, kemunculan kata tersebut belum cukup untuk memastikan komentar secara langsung mendukung PMK Nomor 81 Tahun 2025. Interpretasi *word cloud* perlu disertai pemeriksaan konteks komentar.



Gambar 6. Bar Chart Stance Menerima

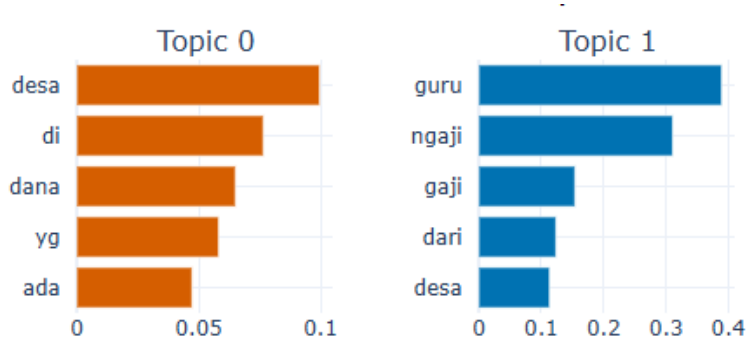
Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa komentar dalam kelompok menerima memuat pembahasan mengenai pengawasan dana desa, figur pengambil kebijakan, dan persetujuan terhadap gagasan tertentu. Namun, interpretasi tersebut perlu memperhatikan konteks setiap komentar untuk membedakan dukungan terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 dari dukungan terhadap figur atau tanggapan terhadap persoalan lain.

Hasil pemodelan topik pada kelompok stance menerima menghasilkan enam subtopik utama. Tema-tema tersebut menggambarkan beragam isu yang muncul dalam komentar, termasuk transparansi, pengawasan, dan audit pengelolaan dana desa. Nilai c-TF-IDF dilaporkan sebagai nilai absolut; tanda negatif pada ekspor awal dihapus karena c-TF-IDF yang digunakan untuk interpretasi berada pada rentang positif. Ukuran topik (*Topic Size*) dan persentase diisi berdasarkan output BERTopic final.

Tabel 4. Analisis Bar Chart Stance Menerima

Label Topik	***Top Words***	**Est. *c-TF-IDF Score***	**Interpretasi Tema Pembahasan**
Topic 0	audit, segera, di, setuju, haru	-0.125	Tuntutan pengauditan dan pengawasan anggaran secara menyeluruh dan transparan.
Topic 1	tikus, keluar, tikusnya, memancing, tikus2	-0.158	Penggunaan metafora politik ("tikus") untuk merujuk pada oknum penyeleweng dana.
Topic 2	audit, kantor, semua, desa, kabupaten	-0.078	Pemetaan target pengauditan hingga ke tingkat kelembagaan desa dan daerah
Topic 3	purbaya, dukung, pak, semangat, terus	-0.063	Bentuk dukungan moral publik terhadap figur pengambil kebijakan (Menteri Keuangan)
Topic 4	dana, desa, luar, dr, ada	-0.036	Pembahasan mengenai alokasi dan keberadaan dana desa.

Topic 5	setuju, sangat, netijen, banget, sekal	-0.165	Ekspresi penegasan persetujuan kolektif dari warganet (*netizen*).



Gambar 7. Bar Chart Stance Menolak

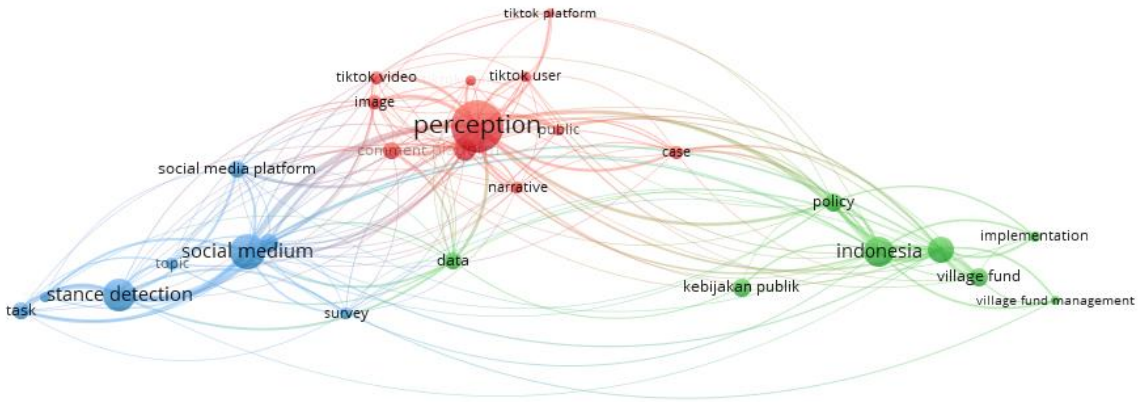
Berbeda dengan kelompok *stance* menerima, kelompok menolak memperlihatkan pembahasan yang berfokus pada alokasi dana desa dan dampaknya terhadap masyarakat. Pada Topik 0, kata "desa", "dana", dan "ada" menunjukkan pembahasan terkait ketersediaan serta pencairan dana desa. Sementara itu, Topik 1 didominasi kata "guru" dengan bobot *c-TF-IDF* sekitar 0,390 dan "ngaji" sekitar 0,310, serta kata "gaji" dan "desa". Kemunculan kata-kata tersebut mengindikasikan adanya pembahasan mengenai pembayaran honor guru ngaji dan insentif yang bersumber dari dana desa. Meski demikian, konteks komentar perlu ditelaah lebih lanjut untuk membedakan penolakan terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 dari kekhawatiran atas dampak kebijakan atau kritik terhadap pengelolaan dana desa.

Tabel 4. Tabel Ringkasan Bar Chart Stance Menolak

Label Topik	Top Words	Est. *c-TF-IDF Score*	Interpretasi Tema Pembahasan
Topic 0	desa, di, dana, yg, ada	-0.100	Kekhawatiran umum terhadap ketersediaan dan keberlangsungan alokasi dana desa
Topic 1	guru, ngaji, gaji, dari, desa	-0.390	Dampak kebijakan terhadap insentif/pembayaran gaji tenaga pengajar dan insentif lokal desa.

Hasil Pemetaan Bibliometrik

Untuk memperkuat landasan penelitian, dilakukan analisis bibliometrik untuk melihat perkembangan kajian yang berkaitan dengan persepsi masyarakat di media sosial, deteksi sikap publik, dan kebijakan publik. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antarkata kunci serta kecenderungan topik yang berkembang dalam literatur. Hasil pemetaan bibliometrik tersebut disajikan pada Gambar 8



Gambar 8. Pemetaan Bibliometrik

Berdasarkan analisis ko-kejadian (*co-occurrence analysis*), peta bibliometrik menunjukkan keterkaitan sejumlah kata kunci yang membentuk beberapa kelompok tema penelitian. Kata kunci *perception* menempati posisi sentral dan terhubung dengan istilah seperti *TikTok video*, *comment*, serta perilaku pengguna media sosial. Pola tersebut menggambarkan keterkaitan kajian persepsi masyarakat dengan konten dan interaksi pengguna di ruang digital.

Dari aspek metodologi, kemunculan kata kunci *stance detection*, *social medium*, dan *topic* menunjukkan keterkaitan antara kajian media sosial dan analisis teks. *Stance detection* digunakan untuk mengidentifikasi posisi pengguna terhadap suatu isu, sedangkan pemodelan topik membantu menemukan tema utama dalam kumpulan teks. Kedua pendekatan ini relevan dengan penelitian yang menganalisis komentar TikTok untuk mengidentifikasi kecenderungan sikap pengguna terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 serta tema pembahasan yang berkembang.

Selain itu, kata kunci *policy*, *kebijakan publik*, *village fund*, dan *village fund management* memperlihatkan keterkaitan kajian media sosial dengan isu kebijakan publik dan pengelolaan dana desa. Kelompok kata kunci tersebut sejalan dengan fokus penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 dalam wacana demonstrasi kepala desa di TikTok. Secara keseluruhan, pemetaan bibliometrik memberikan gambaran mengenai hubungan antara kajian persepsi, analisis sikap di media sosial, dan kebijakan publik, sekaligus menjadi landasan pendukung dalam menempatkan penelitian ini di antara kajian-kajian terdahulu yang relevan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi pengguna TikTok dalam korpus terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 dalam konteks demonstrasi APDESI menunjukkan kecenderungan menerima lebih dominan dibandingkan menolak. Klasifikasi IndoBERT terhadap 6.599 komentar menunjukkan 5.797 komentar (87,8%) cenderung menerima dan 802 komentar (12,2%) cenderung menolak. Temuan ini memperlihatkan bahwa komentar dalam korpus lebih banyak memuat respons yang mendukung isu pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Namun, kecenderungan tersebut tidak serta-merta menunjukkan seluruh komentar menerima setiap ketentuan PMK Nomor 81 Tahun 2025.

Analisis topik BERTopic memperlihatkan perbedaan pola pembahasan. Kelompok menerima didominasi pembahasan audit, pengawasan, transparansi, pertanggungjawaban, dan penegakan aturan pengelolaan dana desa. Kelompok menolak lebih banyak memuat persoalan dana desa serta kritik dan sindiran terhadap pihak yang berkaitan dengan isu tersebut. Sintesis makna temuan menunjukkan bahwa respons pengguna TikTok tidak hanya berupa persetujuan atau penolakan, tetapi juga mencerminkan perhatian terhadap tata kelola dana desa dan tuntutan pengawasan yang lebih baik. Dengan demikian, kolom komentar TikTok dapat dipahami sebagai ruang umpan balik publik yang memuat dukungan, keberatan, kritik, dan harapan terhadap kebijakan.

Hasil penelitian terbatas pada komentar dalam korpus dan tidak dapat digeneralisasikan sebagai representasi seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh pengguna TikTok. Kategori menerima tidak selalu identik dengan persetujuan terhadap seluruh ketentuan kebijakan, dan kategori menolak belum tentu menunjukkan penolakan langsung terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025. Oleh karena itu, hasil klasifikasi perlu dipahami dengan mempertimbangkan konteks komentar, sedangkan pemodelan topik digunakan untuk mengidentifikasi pola pembahasan, bukan untuk memastikan faktor psikologis yang mendasari persepsi pengguna.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pengembangan metode klasifikasi stance yang lebih memperhatikan konteks dan makna komentar agar dapat membedakan dukungan terhadap pengawasan dana desa dari penerimaan terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 secara spesifik. Penelitian selanjutnya disarankan meningkatkan validasi data melalui pelabelan oleh lebih dari dua anotator, memperluas sumber dan periode pengumpulan data, serta mempertimbangkan konteks konten video, karakteristik diskusi, dan perubahan respons pengguna dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menguji model dengan ukuran data uji yang lebih besar, membandingkan beberapa model klasifikasi, dan melaporkan parameter serta ukuran topik secara lengkap untuk memperoleh gambaran respons publik yang lebih akurat. Dengan demikian, kajian persepsi pengguna media sosial diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyampaian informasi dan evaluasi kebijakan yang lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

REFERENSI

Akhyar, A. (2026). TikTok sebagai arena demokrasi digital dalam pembentukan opini publik. *Social Science Academic,* 4(1), 377–396. https://doi.org/10.37680/ssa.9614

ANTARA News. (2025). Demonstrasi APDESI/PMK Nomor 81 Tahun 2025.

Asih. (2025). *Dana Desa tahap II belum cair, 38 pemdes di Kabupaten Semarang kena dampak*. Lingkar TV. https://lingkartv.com/dana-desa-tahap-ii-belum-cair/

Baumann, F., Arora, N., Rahwan, I., & Czaplicka, A. (2025). *Dynamics of algorithmic content amplification on TikTok*. https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-026-00629-2

Bhakuni. (2010). Political system approach by David Easton. *International Journal of Economic Perspectives, 4*(1), 61–63. https://ijeponline.org/index.php/journal/article/view/210

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement, 20*(1), 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104

Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of NAACL-HLT 2019*, 4171–4186. https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423

Fitriani, R. (2026). *Hampir Rp5,9 M DD non earmark 2025 tak cair, desa "dihantui" hutang ke pihak ketiga!* Radar Kepahiang. https://radarkepahiang.disway.id/kepahiang/read/679142/

Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. *arXiv:2203.05794*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.05794

Hermanto Suaib, E. A. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.

Kompas. (2025, 10 Desember). [Judul berita demonstrasi kepala desa/APDESI dan PMK Nomor 81 Tahun 2025]. [URL lengkap].

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics, 33*(1), 159–174. https://doi.org/10.2307/2529310

Masythoh, A., & Wicaksono, N. (2025). Peran media sosial dalam pembentukan persepsi publik terhadap isu lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Sosial, Humaniora dan Politik, 4*(1), 36–42. https://prosiding.appisi.or.id/index.php/PROSEMNASSOSHUMPOL/article/view/10

Prima. (2025). Demonstrasi APDESI/PMK Nomor 81 Tahun 2025.

Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. *Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019*, 3982–3992. https://doi.org/10.18653/v1/D19-1410

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2020). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Setiawan, F. X. R. (2023). Peran media sosial sebagai ruang publik: Gagasan ruang publik. *Melintas, 39*(3), 323–350.

Siswajanthy, F., Shiva, K. A., Salsabila, N., Putry, S. A. S., & Putri, S. M. I. (2024). Analisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(1), 4360–4369.

Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., Soleman, S. R., Mahendra, R., Fung, P., Bahar, S., & Purwarianti, A. (2020). IndoNLU: Benchmark and resources for evaluating Indonesian natural language understanding. *Proceedings of AACL-IJCNLP 2020*, 843–857. https://doi.org/10.18653/v1/2020.aacl-main.85